

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Eli Wuria Dewi. 2015. Hukum Perlindungan Konsumen. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 55.
- Indonesia (a), "*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*," diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, Cetakan. 39 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), Pasal 1150.
- Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: Rahja Grafinddo Persada, 2000), hlm 235-237
- Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, "*Sejarah Nasional Indonesia II: Zaman Kuno*" (Jakarta: Balai Pustaka, 2008).
- Nova Asmirawati, Catatan Singkat Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No. 3, 2012, halaman 452.
- Peter Mahmud Marzuki dalam Dwi Putra Nugraha, et al, *Mengamandemen Ketentuan yang Tidak Dapat Diamandemen dalam Konstitusi Republik Indonesia*. Cet 1 (Yogyakarta: Thafa Media, 2017).
- Salim H. S., "*Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Edisi 1*" (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007).
- Sigit Triandaru dan Totok Budi Santoso, "*Bank dan Lembaga Keuangan Lain*" (2006).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Cet 2 (Depok: Rajawali Pers, 2018).
- Tirta Segara, "*Buku 1 OJK dan pengawasan Mikroprudensial, Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*" (2016).
- Wirjono Prodjodikoro, "*Hukum Perdata Tentang Haki-Hak Atas Benda*" (Jakarta: Soeroengan, 1960).

JURNAL

- Abdul Ghafur Ansori, *Gadai Syariah Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah mada university press, 2005, hlm 129-130.
- Ainon Marziah, Sri Walny Rahayu, and Iman Jauhari, 2019, Pembuktian Risalah Lelang Bagi Pemenang Eksekusi Hak Tanggungan (Proof The Minutes Of Auction For The Winner Of Execution Of Mortgage Rights). Jurnal IUS, Kajian Hukum dan Keadilan, Volume 7, no. 2 hlm. 226.
- Bahrudin S, 2011, Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal, Malang: UIN-MALIKI PRESS, hlm. 7
- Dilva Muzdaliva Sawotong, “*Jaminan Kebendaan Pada PT. Pegadaian Terhadap Barang Yang Digadaikan*” (Lex Privatum, vol 2, no. 1, 2014).
- Henni Muchtar, *Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia* (Humanus Vol. XIV No.1 Th, 2015).
- Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, “*Telaah Yuridis Perkembangan Regulasi dan Usaha Pegadaian Sebagai Pranata Jaminan Kebendaan.*” (Jurnal Bina Mulia Hukum 2 (35), vol. 7, 2017).
- Lastuti Abubakar, “Pranata Gadai Sebagai Alternatif Pembiayaan Berbasis Kekuatan Sendiri (Gagasan pembentukan UU Pegadaian) “, Jurnal Mimbar Hukum-Fakultas Hukum UGM, Vol. 24, No.21, 2012, halaman 13.
- Lien-Sheng Yang, “*Budhis Monasteries and Four Money Raising Institution in Chinese History*“ (Harvard Journal of Asiatic Studies, 13 (1/2), 1950).
- Rany Dias Sukmahati, 2004, Tinjauan Yuridis Pembuatan dan Pelaksanaan Perjanjian Gadai Di Perusahaan Umum Pegadaian Surabaya, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, hlm 17
- Tim FEB UGM dan Tim FE UI Paper, “*Alternatif Struktur OJK Yang Optimum, Kajian Akademik.*” (2010).
- Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, Naskah Akademik: *Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)* 2010.
- Tri Handayani dan Lastuti Abubakar, “Perkembangan Hukum Sektor Jasa Keuangan Dalam Upaya Pertumbuhan Ekonomi Nasional”, Jurnal De Lega Lata, Vol. 2, No.2, 2017, halaman 421.

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

UUD NKRI 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 19 Prp 1990

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Peraturan Pemerintahan RI Nomor 7 Tahun 1969

Peraturan OJK Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan PT Pegadaian (Persero)

Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, pasal 1 angka 9